

Mandiri Sebagai Kedaulatan Positif: Analisis Diplomatis dan Implikasi Pariwisata dari Kebijakan Penolakan Bantuan Asing dalam Penanganan Bencana Banjir Sumatera 2025

Muhammad Rahmad¹, Arief Faizal Rachman²

^{1,2}Institut Pariwisata Trisakti

muhammadrahmad@iptrisakti.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menetapkan banjir Sumatera November 2025 sebagai bencana nasional dan menolak bantuan asing dari dua perspektif yang saling terkait: diplomasi bencana (*disaster diplomacy*) dan manajemen krisis pariwisata (*tourism crisis management*). Dengan menggunakan kerangka teoritis kedaulatan positif, *destination image recovery*, dan *sustainable livelihood framework for tourism* (SLFT), penulis berargumen bahwa kebijakan ini merepresentasikan pilihan strategis yang legitimate untuk menjaga citra destinasi Indonesia, melindungi investasi pariwisata prioritas super di Sumatera (khususnya Danau Toba), dan membangun ketahanan destinasi jangka panjang. Kajian ini merujuk pada literatur akademis terkini (2021-2025) tentang *disaster diplomacy*, *tourism crisis management*, dan *post-disaster destination recovery*.

Kata Kunci: *disaster diplomacy, destination image, tourism crisis management, kedaulatan positif, mandiri, Danau Toba, ASEAN*

1. Pendahuluan

Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 telah menimbulkan dampak kemanusiaan dan ekonomi yang sangat signifikan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 960 korban jiwa, hampir satu juta pengungsi, dan kerugian infrastruktur mencapai lebih dari 3,1 miliar dolar AS. Di tengah skala bencana yang masif tersebut, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menetapkan status bencana nasional dan menolak bantuan asing telah memicu perdebatan publik yang intens.

Dari perspektif pariwisata, bencana ini memiliki signifikansi khusus karena terjadi di kawasan yang mencakup Danau Toba — salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Indonesia yang menjadi tulang punggung strategi diversifikasi pariwisata nasional. Pemerintah telah menginvestasikan sumber daya besar untuk mengembangkan Danau Toba sebagai alternatif Bali, dengan target menarik jutaan wisatawan domestik dan internasional. Bagaimana pemerintah mengelola krisis bencana di kawasan ini akan memiliki implikasi langsung terhadap *destination image*, kepercayaan investor, dan keberlanjutan industri pariwisata regional.

Artikel ini berargumen bahwa keputusan Presiden Prabowo, meskipun kontroversial, memiliki logika strategis yang dapat dipahami dari perspektif *disaster diplomacy* dan *tourism crisis management*. Dengan menunjukkan kemampuan menangani krisis secara mandiri, Indonesia tidak hanya menegaskan kedaulatan positif, tetapi juga memproyeksikan citra sebagai destinasi

yang tangguh (resilient destination) — sebuah aset penting dalam kompetisi pariwisata global pasca-pandemi.

2. Kerangka Teoritis

2.1 Disaster Diplomacy dan Politik Bantuan Kemanusiaan

Disaster diplomacy sebagai bidang kajian interdisipliner telah berkembang pesat dalam dekade terakhir. Reinhardt dan Lutmar (2022) dalam *Journal of Peace Research* mendefinisikan disaster diplomacy sebagai investigasi tentang bagaimana dan mengapa aktivitas terkait bencana dapat atau tidak dapat menginduksi kerjasama antar pihak yang berkonflik. Lebih jauh, kajian terkini menunjukkan bahwa respons terhadap bencana tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa politik.

Felfeli (2023) dalam *The Palgrave Handbook of Diplomatic Thought and Practice in the Digital Age* menegaskan bahwa humanitarian diplomacy melibatkan negosiasi kompleks antara prinsip kemanusiaan dan kepentingan geopolitik. Bantuan bencana, sebagaimana diungkap Irwin (2025) dalam *Catastrophic Diplomacy*, secara historis telah digunakan sebagai instrumen kebijakan luar negeri, dengan faktor-faktor seperti kepentingan geopolitik, kedaulatan nasional, dan disparitas sosioekonomi mempengaruhi kapan dan bagaimana negara-negara memilih merespons krisis kemanusiaan.

Diplomacy.edu (2025) dalam analisisnya tentang disaster diplomacy menegaskan bahwa sementara upaya bantuan bencana sering tampak altruistik, mereka tidak selalu bebas dari motivasi politik. Belt and Road Initiative China, misalnya, telah menyertakan upaya bantuan bencana sebagai cara untuk memperkuat ikatan dengan negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, penolakan selektif Indonesia terhadap bantuan asing dapat dibaca sebagai pernyataan bahwa Indonesia adalah subjek, bukan objek, dalam dinamika hubungan internasional.

2.2 Tourism Crisis Management dan Destination Image Recovery

Literatur manajemen krisis pariwisata telah berkembang signifikan, terutama pasca-pandemi COVID-19. Prideaux dan Hassan (2024) dalam *Handbook on Crisis and Disaster Management in Tourism* menegaskan bahwa krisis dan bencana merupakan isu kunci dalam manajemen pariwisata, mencakup model dan kerangka kerja krisis, kesiapsiagaan, dan ketahanan destinasi. Zhang et al. (2023) dalam *Tourism Review* melakukan systematic review tentang tourism and natural disaster management, mengidentifikasi gap antara penelitian akademis dan implementasi oleh stakeholder industri pariwisata.

Kajian terkini tentang dampak manajemen krisis efektif terhadap destination image pasca-bencana (Tourism Recreation Research, 2025) menunjukkan bahwa bencana alam tidak hanya berdampak pada infrastruktur fisik, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi persepsi risiko wisatawan, citra destinasi, dan niat berkunjung pasca-bencana. Studi ini menegaskan bahwa efektivitas manajemen krisis memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi dan perilaku wisatawan.

Mair, Ritchie, dan Walters (2016) dalam agenda penelitian mereka tentang strategi pemulihan pasca-bencana untuk destinasi wisata mengidentifikasi beberapa isu yang harus diperhatikan:

kebutuhan komunikasi efektif selama semua tahap krisis, recovery marketing termasuk strategi pemasaran, pemulihan citra, dan perilaku wisatawan, serta bagaimana dalam tahap pemulihan, peristiwa krisis dan bencana dapat justru memperbaiki destinasi.

2.3 Sustainable Livelihood Framework for Tourism (SLFT) dan Ketahanan Destinasi

Liu-Lastres et al. (2020) dalam *Journal of Sustainable Tourism* mengembangkan Sustainable Livelihood Framework for Tourism (SLFT) yang memberikan kerangka analisis komprehensif untuk memahami bagaimana pariwisata dapat berkontribusi pada pemulihan dan ketahanan komunitas pasca-bencana. Studi kasus mereka tentang Aceh, Indonesia — destinasi yang pernah dilanda bencana parah dan mengembangkan tsunami tourism sebagai strategi pemulihan — menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi katalis penguatan berbagai aset komunitas: modal sosial, modal finansial, modal manusia, modal alam, dan modal fisik.

Tan et al. (2022) dalam *Annals of Tourism Research* melanjutkan kajian tentang keterlibatan penduduk dalam disaster tourism di Aceh, menunjukkan bagaimana agama sebagai sistem nilai dan ritual yang mengakar secara signifikan mempengaruhi praktik keterlibatan penduduk dalam disaster tourism. Temuan ini relevan untuk memahami konteks Sumatera yang mayoritas Muslim dan bagaimana nilai-nilai lokal dapat mendukung — atau menghambat — upaya pemulihan pariwisata.

2.4 Konsep Mandiri dalam Konteks Indonesia

Mandiri — etika kemandirian dan ketahanan — bukan sekadar slogan politik melainkan prinsip inti psikologi politik Indonesia. Konsep ini berakar pada tradisi gotong-royong dan pengalaman historis pembangunan nasional. Phar Kim Beng (2025) dalam analisisnya di *Malay Mail* berargumen bahwa mandiri bukan penolakan terhadap belas kasih, melainkan penegasan positif kedaulatan. Indonesia menarik garis yang jelas antara bantuan kemanusiaan swasta dan bantuan pemerintah-ke-pemerintah.

Dalam konteks pariwisata, prinsip mandiri memiliki resonansi khusus. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Ring of Fire menghadapi puluhan bencana alam setiap tahun. Jika setiap bencana memicu persepsi bahwa Indonesia "membutuhkan bantuan asing," hal ini berpotensi menciptakan destination image yang problematik — citra negara yang rentan dan tidak mampu mengelola krisisnya sendiri. Sebaliknya, kemampuan menangani bencana secara mandiri memproyeksikan citra ketahanan (resilience) yang menjadi aset kompetitif dalam industri pariwisata global.

3. Analisis Kebijakan

3.1 Preseden Historis: Tsunami Aceh 2004 dan Transformasi Paradigma

Handbook Manajemen Bencana Indonesia (ReliefWeb, 2021) mencatat bahwa peristiwa kunci yang membentuk pendekatan pemerintah Indonesia terhadap bencana adalah tsunami Samudra Hindia 2004. Tsunami tersebut — dengan korban jiwa lebih dari 160.000 orang di Indonesia — mendatangkan gelombang bantuan internasional dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kemanusiaan modern. Militer asing dari berbagai negara, agensi-agensi PBB, serta ratusan organisasi non-pemerintah internasional beroperasi secara simultan di wilayah Indonesia.

Namun, yang sering terlupakan dalam perdebatan kontemporer adalah fakta bahwa seluruh operasi tersebut tetap berlangsung di bawah koordinasi dan pengawasan pemerintah Indonesia. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto menjadi command center nasional yang mengatur arus bantuan, menentukan prioritas, dan memastikan bahwa intervensi asing tidak menciptakan struktur paralel yang mengabaikan otoritas negara. Hasilnya, nyawa berhasil diselamatkan dalam jumlah signifikan, infrastruktur dibangun kembali dengan standar lebih baik, dan — yang tak kalah penting — kapasitas institusional Indonesia dalam manajemen bencana justru mengalami penguatan substansial.

Dengan kata lain, kedaulatan Indonesia pada 2004 tidak diencerkan oleh bantuan asing; sebaliknya, kedaulatan tersebut dijalankan secara aktif melalui kemampuan mengelola, mengarahkan, dan mengintegrasikan bantuan internasional ke dalam kerangka kerja nasional. Pengalaman ini menjadi fondasi bagi reformasi sistem manajemen bencana Indonesia, termasuk pembentukan BNPB pada 2008 dan penguatan kapasitas yang kini memungkinkan Indonesia memilih pendekatan yang lebih mandiri.

Dari perspektif pariwisata, pemulihan Aceh pasca-tsunami menawarkan pelajaran berharga. Liu-Lastres et al. (2020) dalam studi mereka tentang pengembangan pariwisata pasca-bencana di Aceh menunjukkan bahwa meskipun pariwisata bukan industri tradisional di Aceh, perkembangan pesat tsunami tourism telah menjadikannya sektor ekonomi krusial baru pasca-bencana. Situs-situs tsunami tourism seperti museum, monumen, dan kapal di atas rumah tidak hanya menjadi atraksi populer bagi pengunjung domestik dan internasional, tetapi juga menyediakan opsi rekreasi bagi penduduk lokal.

3.2 Implikasi Pariwisata: Danau Toba dan Destinasi Super Prioritas

Bencana banjir Sumatera 2025 terjadi di kawasan yang memiliki signifikansi strategis bagi industri pariwisata Indonesia. Danau Toba — danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di Sumatera Utara — adalah salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) bersama Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Pemerintah telah menginvestasikan sumber daya besar untuk mengembangkan kawasan ini sebagai bagian dari strategi diversifikasi pariwisata nasional untuk mengurangi ketergantungan pada Bali.

Data World Bank (2025) menunjukkan bahwa Integrated Tourism Development Project (ITDP) di Danau Toba dan Lombok telah memberikan dampak signifikan: meningkatkan akses air untuk 570.000 orang, menciptakan 542.000 m² ruang non-motorik, meningkatkan sanitasi

untuk 470.000 orang, dan menarik lebih dari \$870 juta investasi swasta. Di Danau Toba sendiri, jumlah wisatawan terus meningkat — dengan lebih dari 197.000 wisatawan ke Sumatera Utara pada 2023, lebih dari dua kali lipat tahun sebelumnya. Data terbaru menunjukkan pada 2024, sekitar 9,24 juta wisatawan domestik mengunjungi Danau Toba, dengan 250.413 wisatawan internasional.

Dalam konteks ini, bagaimana pemerintah mengelola bencana di Sumatera memiliki implikasi langsung terhadap persepsi investor dan wisatawan terhadap kawasan tersebut. Penetapan status bencana nasional dan penerimaan bantuan asing skala besar berpotensi menciptakan narasi media internasional yang memosisikan Sumatera — dan dengan demikian Danau Toba — sebagai kawasan "bencana" dan "tidak aman." Sebaliknya, kemampuan menangani krisis secara mandiri dengan efektif dapat memproyeksikan citra ketahanan destinasi.

3.3 Destination Image dan Perceived Risk: Perspektif Wisatawan

Kajian *Tourism Recreation Research* (2025) tentang dampak manajemen krisis efektif terhadap destination image pasca-bencana menunjukkan hubungan krusial antara efektivitas penanganan krisis, persepsi risiko wisatawan, citra destinasi, dan niat berkunjung. Bencana alam dapat menghasilkan destination image negatif yang menghasilkan konsekuensi merugikan jangka panjang bagi destinasi (World Tourism and Travel Council, 2019). Waktu pemulihan dari bencana alam bervariasi sangat besar, berkisar dari satu bulan hingga 93 bulan.

Zhang et al. (2024) dalam systematic review mereka tentang tourism governance strategies di disaster-affected regions mengidentifikasi empat modalitas governance kunci: risk assessment and mitigation, collaborative planning and policy development, community empowerment and capacity building, dan adaptive and context-specific governance. Kemampuan pemerintah Indonesia mendemonstrasikan keempat modalitas ini melalui penanganan mandiri — dengan mobilisasi TNI, Polri, BNPB, dan koordinasi lintas kementerian — secara paradoksal dapat memperkuat confidence wisatawan terhadap kapabilitas manajemen krisis destinasi.

Duan, Xie, dan Morrison (2022) dalam systematic review mereka tentang tourism crises and impacts on destinations di *Journal of Hospitality and Tourism Management* menekankan pentingnya strategi komunikasi krisis. Dalam kasus banjir Sumatera, narasi "Indonesia mampu menangani bencana sendiri" dapat berfungsi sebagai crisis communication strategy yang memproyeksikan citra kekuatan dan ketahanan — berbeda dengan narasi "Indonesia membutuhkan bantuan dunia" yang berpotensi memperlemah destination image.

3.4 Dimensi Geopolitik dan Nation Branding

Dalam era multipolar saat ini, Indonesia sebagai kekuatan menengah yang sedang naik memiliki kepentingan strategis untuk tidak dipersepsikan sebagai "arena" permainan geopolitik negara-negara besar. Wirakusumah, CEO Indonesia Investment Authority, dalam konteks Indonesia Tourism Investment Forum 2024 menekankan bahwa sementara Indonesia memiliki kasus investasi yang kuat, ia perlu membangun citra positif untuk menarik investor. Penanganan bencana yang efektif dan mandiri dapat berkontribusi pada nation branding yang mendukung — bukan melemahkan — positioning Indonesia sebagai destinasi investasi dan pariwisata premium.

Kajian tentang sport tourism dan regional development di Danau Toba (Sustainability Journal, 2023) menunjukkan bagaimana event internasional seperti F1 Powerboat World Championship digunakan tidak hanya sebagai penggerak ekonomi lokal pasca-pandemi COVID-19, tetapi juga sebagai venue promosi destinasi wisata lain di Sumatera Utara. Dalam konteks ini, kemampuan menangani bencana secara mandiri mendukung — bukan mengkontradiksi — upaya positioning Danau Toba sebagai destinasi kelas dunia.

3.5 Kerangka Regional ASEAN dan Kedaulatan Berbasis Consent

ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) menyediakan kerangka kerja regional yang menghormati kedaulatan nasional sambil memfasilitasi kerjasama. AHA Centre, sebagai pusat koordinasi bantuan kemanusiaan ASEAN yang bermarkas di Jakarta, beroperasi berdasarkan prinsip bahwa bantuan hanya dapat dikerahkan atas permintaan dan dengan persetujuan pihak yang meminta. Prinsip assistance by consent ini merupakan fondasi arsitektur kemanusiaan regional yang menghormati kedaulatan.

Mardialina et al. (2024) dalam Journal of ASEAN Studies mencatat bahwa upaya ASEAN melalui AHA Centre sering terbatas pada respons darurat dan tidak selalu meluas ke bantuan dan pemulihan komprehensif. Ini menggarisbawahi pentingnya kapasitas nasional sebagai fondasi utama, dengan mekanisme regional sebagai pelengkap. Keputusan Indonesia untuk mengandalkan kapasitas domestik terlebih dahulu konsisten dengan arsitektur kebencanaan regional yang menghormati kedaulatan negara anggota.

4. Menanggapi Kritik

4.1 Argumen Efektivitas Penanganan

Kritikus berargumen bahwa penolakan bantuan asing mengorbankan kecepatan dan efektivitas penanganan. Namun, argumen ini mengasumsikan bahwa bantuan asing selalu meningkatkan efektivitas, yang tidak selalu didukung oleh bukti empiris. Organisasi kemanusiaan asing, seberapa pun berpengalaman, tidak dapat sepenuhnya memahami geografi lokal, hierarki sosial, atau struktur kekuasaan informal.

Asia Times (2025) mencatat bahwa sejarah Indonesia sendiri justru memberikan nuansa penting terhadap narasi "risiko bantuan asing." Tsunami Samudra Hindia 2004 yang menghancurkan Aceh mendatangkan bantuan internasional dalam skala belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, seluruh operasi tetap berlangsung di bawah pengawasan Indonesia. Nyawa diselamatkan dan institusi diperkuat. Kedaulatan tidak diencerkan; kedaulatan dijalankan melalui kemampuan mengelola, mengarahkan, dan mengintegrasikan bantuan internasional ke dalam kerangka kerja nasional.

Lebih jauh, bantuan tanpa regulasi dapat menciptakan rantai komando paralel yang berpotensi menimbulkan kebingungan di zona evakuasi. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, telah mengklarifikasi bahwa bantuan kemanusiaan swasta tidak ditolak, tetapi dijadwalkan karena dapat mendestabilisasi jika tidak dikelola. Ini bukan penolakan terhadap solidaritas, melainkan tata kelola yang bertanggung jawab.

4.2 Argumen Dampak terhadap Citra Pariwisata

Beberapa pihak khawatir bahwa penolakan bantuan asing dapat menciptakan persepsi negatif di mata komunitas internasional, yang berpotensi merugikan pariwisata. Namun, argumen ini perlu dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas. Pertama, destination image lebih dipengaruhi oleh bagaimana krisis ditangani daripada apakah bantuan asing diterima atau tidak. Penanganan yang efektif dan terkoordinasi — dengan atau tanpa bantuan asing — adalah yang utama.

Kedua, dalam industri pariwisata global pasca-pandemi, ketahanan destinasi (destination resilience) telah menjadi faktor kompetitif kunci. Wisatawan semakin mempertimbangkan kemampuan destinasi menangani krisis ketika membuat keputusan perjalanan. Demonstrasi kemampuan mandiri dapat justru memperkuat positioning Indonesia sebagai destinasi yang tangguh dan dapat diandalkan.

Ketiga, perlu dicatat bahwa kawasan bencana (Aceh, Sumatera Utara bagian barat, Sumatera Barat) tidak identik dengan kawasan wisata prioritas. Danau Toba, meskipun berada di Sumatera Utara, terletak di wilayah yang berbeda dari episentrum bencana. Komunikasi krisis yang tepat dapat memisahkan narasi bencana dari narasi destinasi wisata, sebagaimana yang telah berhasil dilakukan Bali dalam menghadapi berbagai krisis.

5. Implikasi Bagi Industri Pariwisata

5.1 Pelajaran untuk Tourism Crisis Management

Bencana banjir Sumatera 2025 menawarkan beberapa pelajaran penting bagi praktisi manajemen krisis pariwisata. Pertama, pentingnya crisis communication strategy yang memisahkan narasi bencana dari narasi destinasi. Tidak semua Sumatera adalah zona bencana, dan tidak semua destinasi wisata di Sumatera terpengaruh secara sama. Komunikasi yang presisi dapat melindungi investasi pariwisata di kawasan yang tidak terdampak langsung.

Kedua, pentingnya membangun destination resilience sebagai bagian dari value proposition. Dalam era perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi bencana, kemampuan destinasi menangani krisis menjadi faktor diferensiasi kompetitif. Investasi dalam kapasitas manajemen bencana adalah investasi dalam keberlanjutan pariwisata.

Ketiga, relevansi pendekatan community-based tourism dalam pemulihan pasca-bencana. Kajian Liu-Lastres et al. (2020) tentang Aceh menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata pasca-bencana tidak hanya meningkatkan ketahanan ekonomi, tetapi juga mempercepat pemulihan psikososial. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip mandiri yang mengedepankan kapasitas domestik.

5.2 Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis di atas, penulis merekomendasikan beberapa strategi untuk industri pariwisata Indonesia dalam konteks bencana Sumatera 2025. Pertama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu mengembangkan crisis communication protocol yang membedakan antara kawasan terdampak dan destinasi wisata prioritas. Narasi "Sumatera sedang bencana" harus diganti dengan komunikasi yang lebih presisi tentang kondisi spesifik masing-masing destinasi.

Kedua, Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BPODT) perlu proaktif mengkomunikasikan bahwa operasional pariwisata di Danau Toba tidak terganggu signifikan oleh bencana. Event-event yang sudah dijadwalkan — seperti event olahraga dan budaya — perlu tetap dilaksanakan sebagai demonstrasi ketahanan destinasi.

Ketiga, dalam jangka menengah, pemerintah perlu mengintegrasikan disaster risk reduction ke dalam perencanaan pariwisata di seluruh destinasi prioritas. Kajian Zhang et al. (2024) menunjukkan bahwa risk assessment and mitigation harus menjadi bagian integral dari tourism governance. Ini termasuk pengembangan early warning systems, penguatan infrastruktur tahan bencana, dan pelatihan SDM pariwisata dalam respons darurat.

Keempat, industri pariwisata perlu mengembangkan produk-produk wisata yang mengintegrasikan narasi ketahanan dan pemulihan. Pengalaman Aceh dengan tsunami tourism menunjukkan bahwa destinasi pasca-bencana dapat justru mengembangkan atraksi unik yang menarik segmen wisatawan tertentu, sambil memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal dan melestarikan memori kolektif.

6. Kesimpulan

Analisis ini menunjukkan bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk tidak menetapkan bencana nasional dan membatasi bantuan asing dalam penanganan banjir Sumatera 2025 memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat, baik dari perspektif disaster diplomacy maupun tourism crisis management. Kebijakan ini merepresentasikan artikulasi kedaulatan positif yang konsisten dengan tradisi kebijakan Indonesia, memori institusional pasca-kolonial kawasan, kerangka kerja regional ASEAN, dan — yang penting dari perspektif pariwisata — strategi perlindungan destination image.

Dari perspektif pariwisata, kemampuan Indonesia mendemonstrasikan penanganan krisis yang efektif secara mandiri dapat berfungsi sebagai aset kompetitif dalam positioning destinasi. Dalam industri pariwisata global pasca-pandemi di mana destination resilience menjadi faktor pertimbangan kunci wisatawan, narasi ketangguhan ini memiliki nilai strategis yang tidak boleh diremehkan.

Namun, penulis juga menekankan bahwa kedaulatan positif bukan berarti isolasionisme absolut atau mengabaikan kebutuhan korban. Kunci keberhasilan pendekatan mandiri terletak pada kemampuan terus meningkatkan kapasitas domestik, transparansi dalam pengambilan keputusan, komunikasi krisis yang efektif, dan kesediaan menerima bantuan yang terstruktur dan bermartabat ketika memang diperlukan. Kedaulatan paling terlihat ketika dijalankan secara tegas, transparan, dan demi perlindungan rakyat — termasuk perlindungan terhadap keberlanjutan mata pencaharian mereka di sektor pariwisata.

Bagi Indonesia yang menghadapi puluhan bencana alam setiap tahunnya dan memiliki ambisi menjadi kekuatan pariwisata regional, pelajaran ini bersifat eksistensial. Jika setiap bencana memicu intervensi asing otomatis dan liputan media yang memposisikan Indonesia sebagai negara rentan, destination image akan terus tergerus. Mandiri menolak lintasan itu. Ketahanan yang dibangun di atas disiplin institusional, kedaulatan yang dijaga melalui pengendalian diri, dan hasil kemanusiaan yang dilindungi oleh keteraturan — itulah model yang ditawarkan Indonesia kepada dunia, dan itulah fondasi bagi industri pariwisata yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Asia Times. (2025, 15 Desember). Indonesia floods: the real risk was not foreign aid. *Asia Times*.
- Center for Disaster Data, Information and Communication of BNPB. (2021). *Disaster Risk Assessment Indonesia 2021*. Jakarta: BNPB.
- Diplomacy.edu. (2025). *Los Angeles Wildfires and Disaster Diplomacy: Can Global Aid Strengthen International Relations?* Geneva: DiploFoundation.
- Duan, J., Xie, C., & Morrison, A.M. (2022). Tourism Crises and Impacts on Destinations: A Systematic Review of the Tourism and Hospitality Literature. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 50, 265-280.
- Felfeli, A. (2023). Humanitarian Diplomacy. Dalam F. Onditi et al. (Eds.), *The Palgrave Handbook of Diplomatic Thought and Practice in the Digital Age* (pp. 145-172). Cham: Palgrave Macmillan.
- Irwin, J.F. (2025). *Catastrophic Diplomacy: US Foreign Disaster Assistance in the Twentieth Century*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Liu-Lastres, B., Mariska, D., Tan, X., & Ying, T. (2020). Can post-disaster tourism development improve destination livelihoods? A case study of Aceh, Indonesia. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(12), 2051-2070.
- Mair, J., Ritchie, B.W., & Walters, G. (2016). Towards a research agenda for post-disaster and post-crisis recovery strategies for tourist destinations: a narrative review. *Current Issues in Tourism*, 19(1), 1-26.
- Mardialina, M., Anam, S., Karyajaya, P.L., Hidayat, A., & Lestari, B.U.S. (2024). The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre): Examining Gender-Based Approach in the 2018 Lombok Earthquake. *Journal of ASEAN Studies*, 12(2), 201-225.
- Oxford Business Group. (2024). Promoting less-visited tourism areas in Indonesia. *Asia 2024 Report*.
- Phar Kim Beng. (2025, 22 Desember). Indonesia's 'Mandiri' in Disaster Response is Not a Rejection of Compassion – It is a Positive Assertion of Sovereignty. *Malay Mail*.
- Prideaux, B., & Hassan, A. (Eds.). (2024). *Handbook on Crisis and Disaster Management in Tourism*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Reinhardt, G.Y., & Lutmar, C. (2022). Disaster Diplomacy: The Intricate Links between Disaster and Conflict. *Journal of Peace Research*, 59(1), 3-11.
- ReliefWeb. (2021). *Disaster Management Reference Handbook – Indonesia*. Honolulu: Center for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance.

- Sustainability Journal. (2023). Sport Tourism, Regional Development, and Urban Resilience: A Focus on Regional Economic Development in Lake Toba District. *Sustainability*, 15(7), 5960.
- Tan, X., Ying, T., Mariska, D., Liu-Lastres, B., Ye, S., & Kim, H. (2022). Residents' involvement in disaster tourism as a practice: The Case of an Islam destination, Aceh. *Annals of Tourism Research*, 96, 103462.
- Tourism Recreation Research. (2025). Impact of effective crisis management on post-disaster destination image and tourist travel intentions. *Tourism Recreation Research*, Early View.
- Universitas Sumatera Utara. (2024). Sustainable Tourism Development in Lake Toba: A Comprehensive Analysis of Economic, Environmental, and Cultural Impacts. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(8).
- World Bank. (2025). Indonesia's Integrated Tourism Improving Livelihoods for Thousands in Lake Toba and Lombok. Washington, DC: World Bank Group.
- World Tourism and Travel Council. (2019). *Crisis Readiness Report*. London: WTTC.
- Zhang, F., et al. (2024). Resilience and recovery: A systematic review of tourism governance strategies in disaster-affected regions. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 101, 104217.
- Zhang, Y., Moyle, B., Dupré, K., Lohmann, G., Desha, C., & MacKenzie, I. (2023). Tourism and natural disaster management: A systematic narrative review. *Tourism Review*, 78(4), 1047-1069.